PEMBIAYAAN SDGs: OPTIMALISASI & MOBILISASI SUMBER-SUMBER ALTERNATIF

Jakarta, 4 Maret 2020

AH MAFTUCHAN

Direktur Eksekutif The PRAKARSA & Pengamat Kebijakan Publik

www.theprakarsa.org

PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

TREND DAN PETA PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara 2010-2018
(dalam triliun)

Tahun	Penerimaan Pajak	PNBP	Hibah	Total
2010	723.3	268.9	3.0	**995.3**
2011	873.9	331.5	5.3	**1210.6**
2012	980.5	351.8	5.8	**1338.1**
2013	1077.3	354.8	6.8	**1438.9**
2014	1146.9	398.6	5.0	**1550.5**
2015	1240.4	255.6	12.0	**1508.0**
2016	1310.2	262.0	9.0	**1555.9**
2017	1343.5	311.2	11.7	**1666.4**
2018	1518.8	409.3	15.6	**1943.7**

Sumber: http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset, Kemenkeu RI

- Total penerimaan negara meningkat lebih dari dua kali lipat pada satu dekade terakhir, dari Rp995.3 triliun pada 2010 menjadi Rp1.943.7 triliun pada 2019.
- Peningkatan terjadi di semua sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah

TREND DAN PETA PENERIMAAN NEGARA

Ratio Penerimaan Negara Terhadap PDB

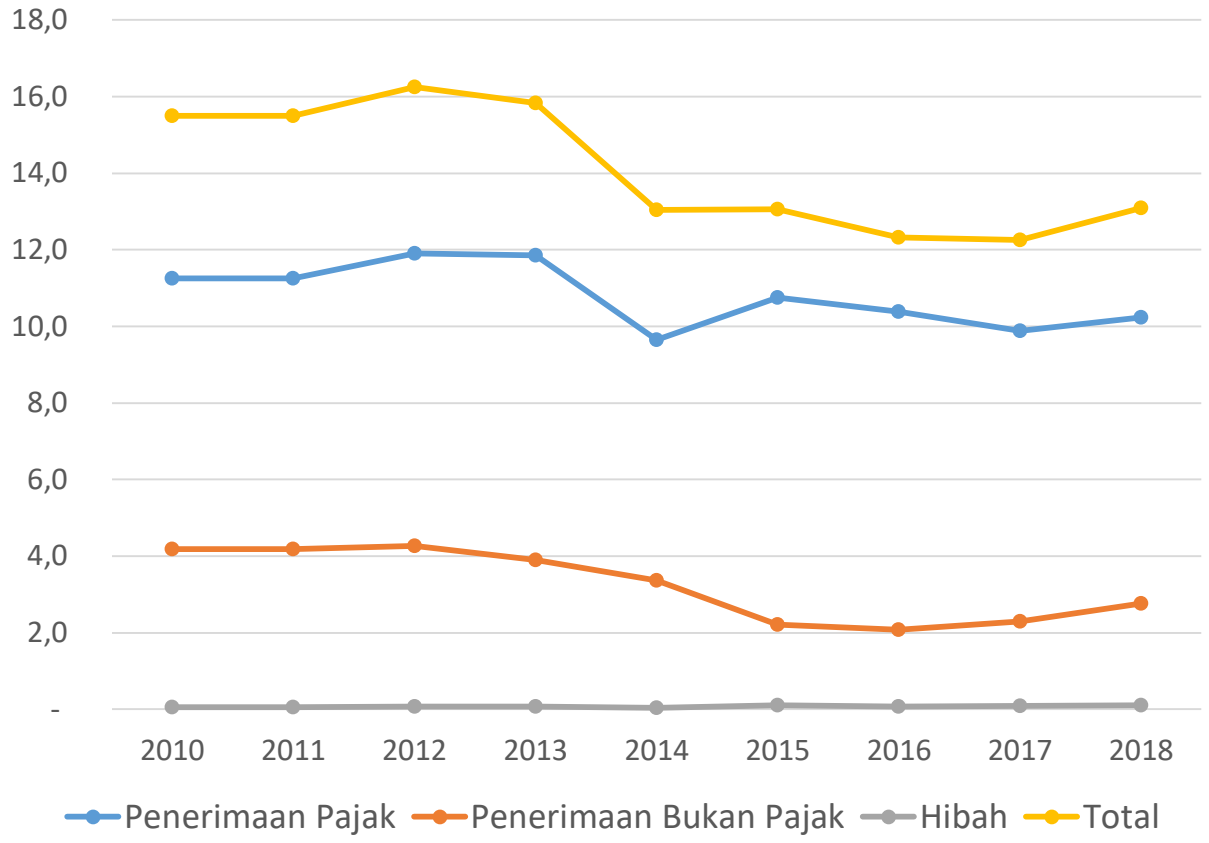

Sumber: http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset, Kemenkeu RI

- Ironisnya, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami penurunan dari 15,5 persen pada 2010 menjadi 13.1 persen pada 2018.
- Penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak walaupun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia.

PERKEMBANGAN WAJIB PAJAK DAN RASIO KEPATUHAN PAJAK

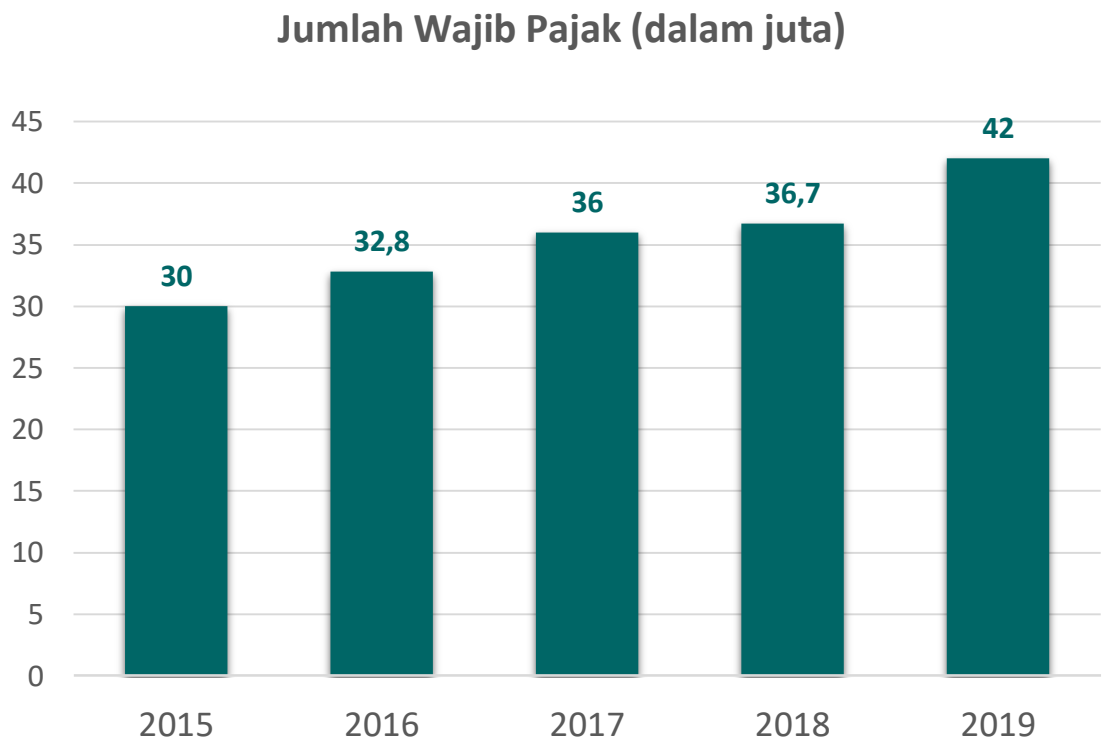

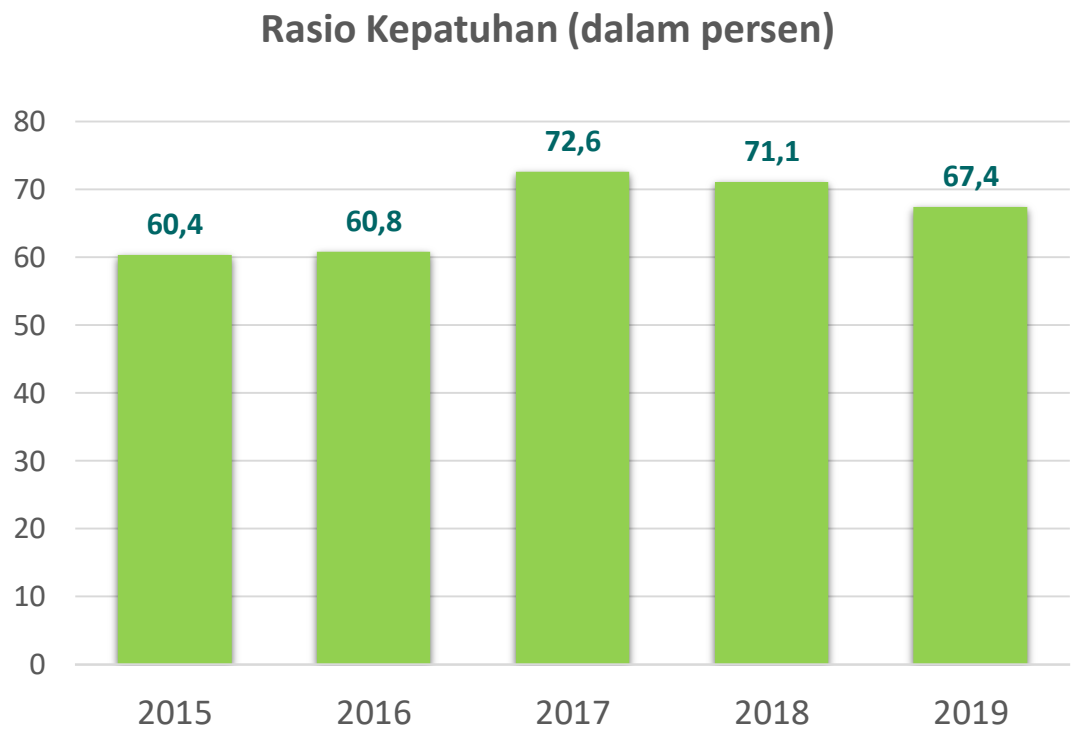

- Dalam lima tahun, terjadi peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan.
- Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 12 juta jiwa dari 30 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 42 juta pada tahun 2019.
- Akan tetapi, rasio kepatuhan pajak (dalam tiga tahun terakhir) justru mengalami penurunan.
- Pada tahun 2017 rasio kepatuhan 72,6%, turun menjadi 71,1% pada 2018 dan turun menjadi 67,4% pada 2019

Sumber: Kementerian Keuangan RI

SDGs & KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan SDGs dalam *Roadmap SDGs* Indonesia 2030 adalah sebagai berikut:

Business as usual (BAU)

Tahun 2020	Tahun 2030
Rp2.714 triliun	**Rp7.721 triliun**

Intervensi Moderat

Tahun 2020	Tahun 2030
Rp2.778 triliun	**Rp9.405 triliun**

Intervensi Tinggi

Tahun 2020	Tahun 2030
Rp2.867 triliun	**RRp10.397 triliun**

HANYA

Rp2.200*/tahun*

BESARAN APBN

GAP ANTARA PENERIMAAN NEGARA DENGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SDGs

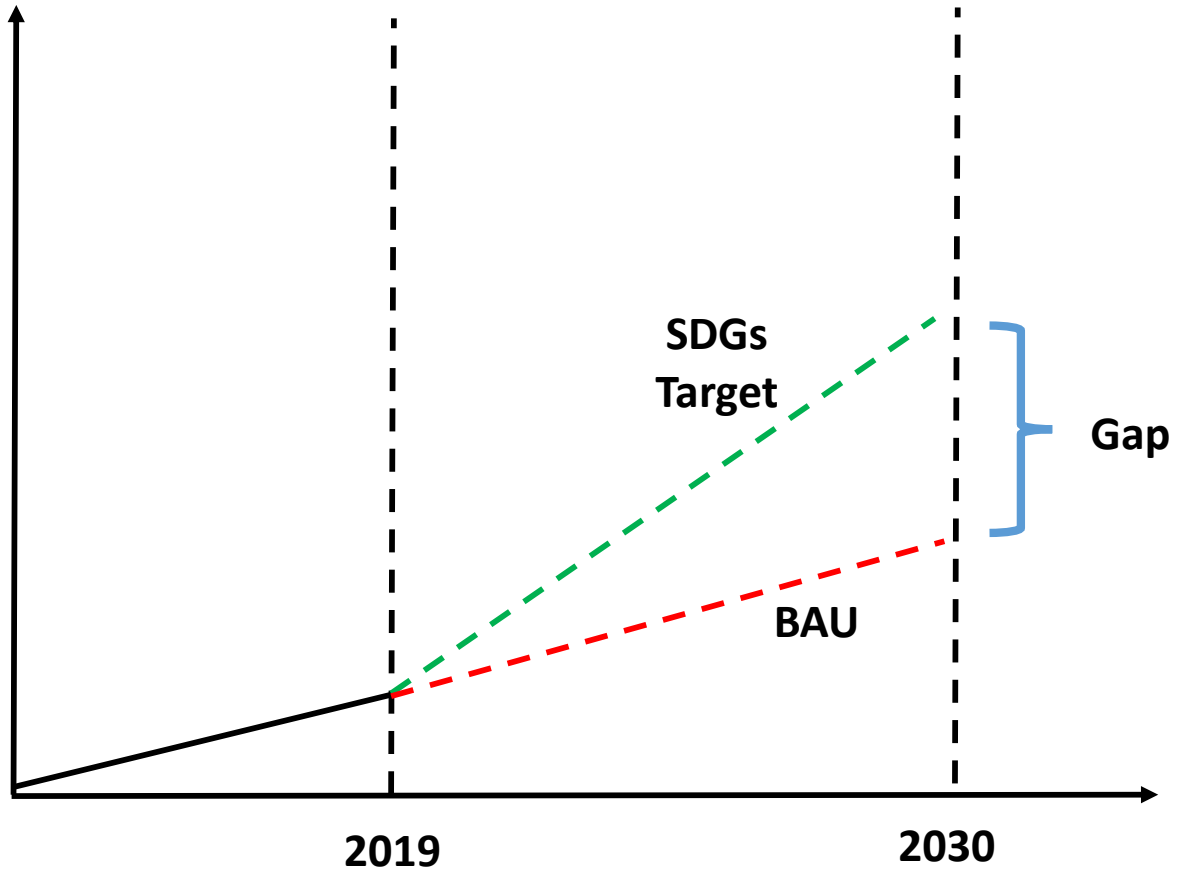

- Jika pada tahun 2020 sampai tahun 2030, pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme Business as Usual (BAU), gap antara kebutuhan pembiayaan SDGs dengan dana yang tersedia sangat tinggi.
- Diperlukan mekanisme pembiayaan alternatif dan mobilisasi sumber-sumber penerimaan alternative untuk menutupi gap pembiayaan SDGs

REKOMENDASI DAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN … (1)

Menaikkan target penerimaan pajak sehingga bisa meningkatkan tax ratio, karena saat ini tax ratio Indonesia hanya sekitar 11% -- menuju 16% - 18%

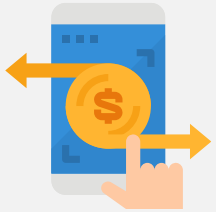

Ekstensifikasi pajak atau perluasan basis pajak seperti:

1. High-net-worth-individual (HNWI)
2. Basis pajak lain seperti pajak untuk transaksi elektronik --
3. Mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak
4. Dll

Ekstensifikasi basis cukai! Dari 1995-2018, barang kena cukai di Indonesia hanya 3 yaitu tembakau, etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alcohol.
Padahal masih banyak barang yang bisa menjadi objek cukai seperti:
BBM fosil, minuman berpemanis buatan, rokok elektronik, plastik, makanan cepat saji dan kertas

REKOMENDASI DAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN … (2)

Earmarking sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan ruang fiscal untuk pembiayaan SDGs, earmarking banyak digunakan sebagai instrumen kebijakan misalkan untuk saat ini kebijakan earmarking dari pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

Mencegah terjadinya Illicit financial Flows

Salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak yaitu Illicit Financial Flow atau aliran keuangan gelap yang terjadi baik masuk dan keluar dari Indonesia. Hasil riset terbaru RAKARSA (2019) menghitung berdasarkan aliran keuangan gelap keluar dan masuk pada enam komoditas pada 1989-2017 kehilangan potensi penerimaan pajak Indonesia dalam kurun waktu tersebut mencapai 11,1 milyar USD

Menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak

REKOMENDASI DAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN … (3)

Melakukan realokasi APBN/APBD/Dana Desa

Pemerintah pusat, daerah dan desa perlu melakukan realokasi anggaran untuk pembiayaan SDGs. Desa perlu didorong agar membentuk "Desa SDGs"

Memobilisasi peran swasta dan organisasi masyarakat sipil

Inisiasi non-state aktor perlu direkognisi dan dikuatkan oleh pemerintah

PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

PERKUMPULAN PRAKARSA

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8E

Pasar Minggu, Jakarta

+62 21 7811 798

perkumpulan@theprakarsa.org

www.theprakarsa.org

perkumpulan Prakarsa

theprakarsa

theprakarsa